

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERDA

No.	Uraian		Analisis	Uraian Perubahan	
1	Perda Nomor 8 Tahun 2010	Tentang Pajak Daerah	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perda 1 Tahun 2019	Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2	Perda Nomor 10 Tahun 2010	Tentang Retribusi Jasa Umum	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perda 8 Tahun 2013	Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
				Perda 4 Tahun 2014	Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
				Perda 4 Tahun 2016	Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
				Perda 7 Tahun 2018	Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
3	Perda Nomor 5 Tahun 2011	Tentang Penyelenggaraan Reklame.	Masih Berlaku		
4	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Tentang Retribusi Jasa Usaha	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)		

PERBUP

No.	Uraian		Analisis	Uraian Perubahan	
1	Perbup Nomor 38 Tahun 2005	Tentang Pola Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2005	Masih Berlaku		
2	Perbup Nomor 25 Tahun 2010	Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih Berlaku		
3	Perbup Nomor 54 Tahun 2012	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.	Masih Berlaku (Perlu Revisi sesuai perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah Perbup Nomor 39 Tahun 2016)		

No.	Uraian		Analisis	Uraian Perubahan	
4	Perbup Nomor 58 Tahun 2012	Tentang Tata cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame.	Masih Berlaku (Perlu Revisi sesuai perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah Perbup Nomor 39 Tahun 2016)		
5	Perbup Nomor 59 Tahun 2012	Tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.	Masih Berlaku		
6	Perbup Nomor 1 Tahun 2013	Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.	Masih Berlaku		
7	Perbup Nomor 32 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 62 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8	Perbup Nomor 44 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 52 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9	Perbup Nomor 45 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 59 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10	Perbup Nomor 46 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 60 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	Perbup 48 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum jelas diketahui Wajib Pajak	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 61 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajak
12	Perbup 52 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 56 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
13	Perbup Nomor 15 Tahun 2015	Tentang Tata Cara Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	Masih Berlaku		

No.	Uraian		Analisis	Uraian Perubahan	
14	Perbup 39 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Masih Berlaku		
15	Perbup 13 Tahun 2017	Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah	Masih Berlaku (Proses perubahan perbup tentang UPT, Pelayanan Pajak Daerah)dibagian Hukum		
16	Perbup 49 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 53 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
17	Perbup 53 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 54 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
18	Perbup 51 Tahun 2013	Tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 55 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
19	Perbup 51 Tahun 2013	Tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 55 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
20	Perbup 36 Tahun 2013	Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Masih Berlaku (beberapa pasal perlu dirubah / disesuaikan)	Perbup 48 Tahun 2017	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
21	Perbup 25 Tahun 2019	Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Secara Online	Masih berlaku		

SK KEPALA BADAN

No.	Uraian		Analisis	Uraian Perubahan	
1	Nomor 973/204/KEP/35.07.205/2017	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tentang Standart Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Malang (37 SOP /37 BAB)	Masih Berlaku		
2	Nomor 180/067/KEP/35.07.205/2017	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tentang Standart Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang	Masih Berlaku		
3	Nomor 11 180/92/KEP/35.07.205/2018	Standar Pelayanan Publik	Masih Berlaku (Perlu disesuaikan dengan Perda No.1/289 tentang Pajak Daerah)		
4	Nomor 88.4/185 KEP/35.07.205/2020	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tentang Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Online Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020	Masih Berlaku		